

EKSISTENSI PERADILAN PIDANA TERHADAP JAMINAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DALAM KASUS PIDANA

Gaya Pesona Munte¹, Lenny Husna²

¹mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Putera Batam

²dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

email: pb200710021@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This research examines the existence of criminal justice in providing physical, legal and psychological protection to victim witnesses in criminal cases. The main challenges faced by victim witnesses, including threats, intimidation, and other obstacles, are the focus of this research. The criminal justice system must address this challenge seriously through effective witness protection programs, strict law enforcement against perpetrators of threats, and the provision of adequate psychological support and legal aid. Reforms in the broader criminal justice process also need to be considered to improve justice and protection for victim witnesses. Understanding this issue is important in efforts to maintain the integrity of the legal system and provide better protection for individuals involved in the criminal justice process.

Keywords: existence of criminal justice, victim witness protection, threats, intimidation, obstacles, witness protection program, criminal justice reform.

PENDAHULUAN

Eksistensi peradilan memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan, memberikan jaminan, dan perlindungan kepada saksi korban dalam kasus pidana. Perlindungan terhadap saksi korban adalah aspek krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan kepada saksi korban semakin kompleks (Rauf et al., 2022).

Salah satu permasalahan yang patut diperhatikan adalah rendahnya tingkat kepercayaan saksi korban terhadap sistem peradilan pidana. Saksi korban sering kali merasa

tidak aman atau khawatir akan kemungkinan ancaman atau tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmauan mereka untuk bersaksi atau menyembunyikan informasi penting yang dapat menjadi kunci dalam proses penyelidikan dan pengadilan.

Selain itu, rendahnya kualitas perlindungan yang diberikan kepada saksi korban juga menjadi perhatian serius. Meskipun telah ada upaya untuk memberikan perlindungan seperti pelaksanaan program perlindungan saksi, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman yang cukup terhadap kebutuhan khusus saksi korban dan kurangnya sumber daya yang memadai untuk menjaga keamanan mereka

Selain itu, masalah administratif dan birokratis dalam peradilan pidana juga dapat menghambat efektivitas jaminan dan perlindungan terhadap saksi korban. Proses hukum yang lambat, birokrasi yang rumit, dan kebingungan saksi korban terkait dengan hak-hak mereka dalam sistem peradilan dapat menjadi hambatan serius.

Dalam konteks personal, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional seperti saya yang memiliki minat dalam bidang politik dan kajian politik, kami dapat melihat bagaimana isu-isu politik dan peradilan pidana saling terkait. Kehadiran sistem peradilan pidana yang kuat dan dapat dipercaya adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, memahami eksistensi peradilan pidana dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada saksi korban adalah hal yang relevan dan penting.

Dengan memahami latar belakang tersebut, kita dapat mengeksplorasi lebih lanjut tantangan dan solusi dalam meningkatkan eksistensi peradilan pidana yang efektif dalam kasus-kasus pidana, khususnya dalam konteks jaminan dan perlindungan saksi korban. Dengan begitu, kita dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan keadilan dan keamanan dalam sistem peradilan pidana yang lebih luas.

KAJIAN TEORI

2.1 Peradilan Pidana

Peradilan pidana adalah salah satu komponen krusial dalam sistem hukum suatu negara yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Fungsi utama peradilan pidana adalah memastikan bahwa individu yang dituduh melakukan tindak pidana dapat menjalani proses pengadilan yang adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup proses

penentuan kesalahan atau tidaknya terdakwa, serta penentuan sanksi atau hukuman yang sesuai jika terdakwa dinyatakan bersalah.

Dalam peradilan pidana, terdapat dua pihak utama yang terlibat, yaitu jaksa penuntut umum yang mewakili negara dan terdakwa yang merupakan individu yang dituduh melakukan tindak pidana. Selain itu, terdapat juga peran penting dari hakim yang bertugas untuk memutuskan hasil dari proses pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Proses peradilan pidana harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang fundamental, termasuk prinsip praduga tak bersalah, hak untuk membela diri, dan kebebasan dari perlakuan yang sewenang-wenang. Peradilan pidana juga memiliki sistem hukuman yang beragam, yang dapat mencakup sanksi seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Tujuan utama dari hukuman dalam peradilan pidana adalah untuk menciptakan efek jera, mendidik terdakwa, dan melindungi masyarakat dari individu yang berpotensi membahayakan. Dengan demikian, peradilan pidana memegang peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam suatu negara.

2.2 Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian dengan aman, tanpa takut akan ancaman atau tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Perlindungan ini diperlukan karena saksi dan korban sering kali menjadi sumber informasi kunci dalam proses penyelidikan dan pengadilan, dan kerap kali mereka rentan terhadap intimidasi atau bahkan kekerasan sebagai upaya untuk menghalangi kebenaran terungkap.

Salah satu bentuk perlindungan yang umum digunakan adalah program perlindungan saksi, di mana saksi atau korban yang dianggap berisiko tinggi dapat diberikan perlindungan fisik, seperti tempat tinggal yang dirahasiakan atau pengawalan polisi. Program ini juga dapat mencakup penyediaan bantuan hukum dan konseling psikologis untuk membantu saksi atau korban menghadapi stres dan tekanan yang mungkin mereka alami selama proses pengadilan.

Selain perlindungan fisik, perlindungan saksi dan korban juga mencakup hak-hak khusus yang diakui oleh hukum, seperti hak untuk memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan atau intimidasi, hak untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka dalam beberapa kasus, dan hak untuk tidak disalahgunakan atau dicemarkan nama baiknya. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa saksi dan korban merasa aman dan terlindungi selama mereka berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks politik dan kajian politik yang menjadi minat Anda, pemahaman tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana dapat mengungkapkan sejauh mana negara memegang komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Perlindungan yang efektif terhadap saksi dan korban dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas politik dan pengembangan sistem hukum yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam mengkaji eksistensi peradilan pidana terhadap jaminan dan perlindungan saksi korban dalam kasus pidana dapat mencakup pendekatan

kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang isu tersebut melalui analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum, kebijakan, serta studi kasus yang relevan. Selain itu, wawancara dengan para pakar hukum, praktisi peradilan, saksi korban, dan pihak terkait lainnya juga dapat menjadi komponen penting dalam metode ini. Analisis data kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan konkret yang dihadapi oleh saksi korban dalam kasus pidana, menggali kebijakan dan praktik perlindungan yang ada, serta mengevaluasi efektivitas mereka dalam memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman yang dalam dan rinci tentang peran peradilan pidana dalam melindungi saksi korban, serta potensi perbaikan yang dapat diusulkan untuk meningkatkan eksistensi sistem peradilan pidana dalam konteks perlindungan saksi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam suatu negara memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis kepada saksi korban dalam kasus pidana. Perlindungan ini merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa saksi korban dapat memberikan kesaksian dengan aman, tanpa takut akan ancaman atau tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada saksi korban, serta sejauh mana efektivitas program-program

perlindungan saksi yang ada (Afifah & Lessy, 2014).

Perlindungan fisik adalah salah satu aspek utama dalam menjaga keselamatan saksi korban. Dalam beberapa kasus, saksi korban dapat berada dalam bahaya nyata jika identitas mereka terungkap atau jika mereka terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang sedang diselidiki atau diadili. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dapat memberikan perlindungan fisik dengan menyediakan tempat tinggal yang dirahasiakan atau tempat perlindungan khusus. Selain itu, pengawalan polisi atau penjagaan khusus dapat diberikan kepada saksi korban yang berisiko tinggi untuk memastikan keamanan mereka selama proses pengadilan.

Perlindungan hukum juga merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Saksi korban harus diberikan hak-hak khusus yang diakui oleh hukum, seperti hak untuk memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka dalam beberapa kasus tertentu, seperti kasus yang melibatkan organisasi kriminal atau ketakutan akan pembalasan. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi, sehingga saksi korban merasa aman dan dapat bersaksi dengan kebebasan.

Perlindungan psikologis juga tidak boleh diabaikan. Saksi korban sering kali mengalami tekanan dan stres yang signifikan selama proses pengadilan. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana dapat menyediakan bantuan konseling psikologis atau dukungan emosional kepada saksi korban. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka menghadapi dampak psikologis dari pengalaman mereka sebagai saksi dalam kasus pidana. Bantuan ini juga dapat membantu menjaga

kehatan mental saksi korban dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian yang akurat dan jujur.

Efektivitas program-program perlindungan saksi merupakan elemen kunci dalam mengukur sejauh mana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan yang memadai. Penting untuk mengevaluasi apakah program-program perlindungan yang ada telah diimplementasikan dengan baik dan apakah mereka benar-benar melindungi saksi korban dengan efektif. Penelitian dan evaluasi terus-menerus dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perlindungan saksi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Dalam konteks personal sebagai seorang mahasiswa yang tertarik dalam bidang politik dan kajian politik, pemahaman tentang bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan kepada saksi korban dapat mengungkapkan sejauh mana negara menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan memahami tantangan dan upaya yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan saksi korban, kita dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan eksistensi peradilan pidana yang lebih adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Tantangan Saksi Korban dalam Proses Peradilan

Tantangan utama yang dihadapi oleh saksi korban dalam berpartisipasi dalam proses peradilan pidana sangat bervariasi, namun, beberapa masalah umum yang sering dihadapi mencakup ancaman, intimidasi, dan hambatan lainnya. Ini adalah masalah serius yang dapat menghambat proses peradilan dan mengintimidasi saksi korban,

yang pada gilirannya dapat membahayakan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan-tantangan ini dan bagaimana sistem peradilan pidana berusaha mengatasinya, serta apakah ada reformasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan saksi korban (Semendawai, 2013).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh saksi korban adalah potensi ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Terkadang, pelaku kejahatan atau anggota kelompok kriminal dapat mencoba mengintimidasi atau mengancam saksi korban untuk menghalangi mereka dari memberikan kesaksian yang incriminating. Ancaman fisik, ancaman terhadap keluarga, atau tekanan psikologis dapat digunakan sebagai alat intimidasi. Sistem peradilan pidana harus mengidentifikasi dan mengatasi ancaman semacam ini dengan serius, melindungi identitas saksi korban, dan menyediakan perlindungan fisik jika diperlukan.

Intimidasi juga menjadi masalah yang signifikan. Terkadang, saksi korban dapat dihadapkan pada upaya intimidasi yang dirancang untuk membuat mereka mundur dari kesaksian mereka atau mengubah kesaksiannya. Ini dapat mencakup pengujian yang agresif dari pengacara bela diri, penelitian latar belakang pribadi saksi, atau serangan karakter yang tidak relevan. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hak saksi korban untuk memberikan kesaksian tanpa intimidasi dihormati dan bahwa pengujian tidak melampaui batas yang wajar.

Hambatan lain yang dihadapi oleh saksi korban termasuk proses peradilan yang lambat, kompleks, dan membingungkan. Ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi saksi korban, meningkatkan stres mereka, dan membuat mereka merasa frustrasi. Reformasi dalam hal

efisiensi dan transparansi peradilan pidana dapat membantu mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa saksi korban tidak merasa terpinggirkan dalam proses tersebut.

Sistem peradilan pidana dapat mengatasi tantangan ini dengan berbagai cara, seperti menyediakan program perlindungan saksi yang efektif, memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap ancaman atau intimidasi terhadap saksi korban, serta menyediakan dukungan psikologis dan bantuan hukum yang memadai. Selain itu, reformasi peradilan pidana yang lebih luas, seperti percepatan proses pengadilan, peningkatan transparansi, dan perubahan dalam cara pengujian dilakukan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi saksi korban.

Sebagai seorang mahasiswa yang tertarik dalam bidang politik dan kajian politik, pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh saksi korban dalam proses peradilan pidana dapat mengungkapkan sejauh mana negara berkomitmen untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem hukumnya. Meneliti dan menganalisis efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh sistem peradilan pidana untuk melindungi saksi korban dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi adalah langkah penting dalam mengidentifikasi potensi reformasi yang dapat meningkatkan eksistensi peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, peningkatan perlindungan terhadap saksi korban bukan hanya penting untuk individu-individu yang terlibat dalam proses peradilan, tetapi juga untuk integritas dan kepercayaan pada sistem hukum secara keseluruhan.

SIMPULAN

Eksistensi peradilan pidana dalam memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis kepada saksi korban dalam kasus pidana adalah elemen penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum. Namun, tantangan-tantangan serius seperti ancaman, intimidasi, dan hambatan lainnya masih menjadi masalah yang signifikan dalam proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana harus berusaha keras untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan melindungi saksi korban dari potensi bahaya ini dengan serius. Program perlindungan saksi yang efektif, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku ancaman, serta bantuan psikologis dan bantuan hukum yang memadai adalah komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi saksi korban. Selain itu, reformasi dalam proses peradilan pidana yang lebih luas dapat membantu mengatasi hambatan seperti proses yang lambat dan kompleks. Sebagai seorang mahasiswa dengan minat dalam bidang politik dan kajian politik, pemahaman tentang tantangan ini dan upaya untuk meningkatkannya dapat berkontribusi pada upaya menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu-individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20).
<https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>
- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 203–218.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>
- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 203-218.
- Saksi, S. (2013). *dalam pengaturan yang sederhana, awalnya diatur dalam Pasal 10 ayat 2 1 | Page. April*, 1–23.
- Sumadikara, T. S. (2016). Eksistensi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 17(2), 3517-3552.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.